Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024

Muhammad Rizky Ramadhan, Lia Nofitasari, Mey Atren Nursasi, Jubaidah Akhmad Zuhad Haekal, Anwar Hafidzi

Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia *e-mail*: <u>rizkky18@gmail.com</u>, <u>liaanofita@gmail.com</u>, <u>meyatrin21@gmail.com</u>, jubaidahfirli753@gmail.com, Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 20-10-2024 | Revised 08-11-2024 | Accepted 24-12-2024

ABSTRACT

The socialization of campaign policy regulations for mayors and deputy mayors is programmed to provide appeals and explain the rules in campaigning in the elections of mayors and deputy mayors in Banjarbaru city. Kpu as the organizer expects that the socialization of regulations and election campaign policies held will make compliance with the rules reach a high presentation rate. The target of this event consists of various layers of aspects, namely Candidate Pairs, candidate winning teams, political parties, Bawaslu, community organizations, youth organizations and others. The socialization method here uses a face-to-face system in order to get the target of achieving success in socialization.

Keywords: Socialization of mayor and deputy mayor campaign policy regulations

ABSTRAK

Sosialisasi regulasi kebijakan kampanye untuk walikota dan wakil walikota diprogramkan untuk memberikan himbauan serta menjelaskan dari tata aturan dalam berkampanye dalam pemilu walikota dan wakil walikota yang berada di kota Banjarbaru. Kpu selaku penyelenggara mengharapkan dari adanya sosialisasi mengenai regulasi dan kebijakan kampanye pemilu yang diadakan ini akan membuat dari kepatuhn mengenai aturan mencapai presentasi angka yang tinggi. Target dari acara ini terdiri dari berbagai macam lapisan aspek yaitu Pasangan Calon, tim pemenangan calon, partai politik, bawaslu, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan lainnya. Metode sosialisai disini menggunakan sistem tatap muka agar mendapatkan dari target pencapaian keberhasilan dalam sosialisasi.

Kata kunci: Sosialisasi regulasi kebijakan kampanye walikota dan wakil walikota



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



A. Pendahuluan

Salah satu wujud dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum dalam rangka menetapkan orang-orang untuk menempati jabatan-jabatan yang strategis di dalam pemerintahan. Pemilu atau pemilihan umum merupakan sarana bagi seseorang untuk membangun sebuah hubungan publik di masyarakat sebagai usaha untuk mempengaruhi rakyat secara halus (persuasif). Komponen utama di dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah rakyat. Sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat. Pemilihan umum merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan membawa perubahan positif bagi daerahnya.

Didalam proses pelaksanaan pemilu maka akan ada namanya tahapan untuk menarik dari pasrtisipasi masyarakat untuk memilih dari pasangan calon yang sedang berkontestasi yaitu kampanye, Kampanye adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kampanye dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan utama dari kampanye adalah untuk mempengaruhi dan mengubah pandangan, sikap, dan perilaku orang-orang dalam masyarakat. Kampanye dapat digunakan untuk mempromosikan memperkenalkan produk atau layanan, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting, atau mengajak orang untuk berpartisipasi dalam suatu gerakan atau aksi kolektif.

Namun, proses kampanye yang tidak terkendali seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya pelanggaran aturan, politik uang, atau bahkan konflik horizontal. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru telah melaksanakan sosialisasi regulasi kebijakan kampanye bagi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang terdapat BAB III Pasal 17 yang menyatakan bahwa Kampanye Tersebut Dilarang mengganggu Kepentingan Umum. Kampanye merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang memberikan ruang bagi partai politik dan calon untuk menyampaikan visi, misi, serta program-programnya kepada masyarakat. Sebagai ajang adu gagasan dan program, kampanye memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan pemilih.

Pada Pemilu yang akan datang akan dihadapkan dengan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, Pemilu tersebut menuntut adanya pengaturan kampanye yang ketat. Regulasi kampanye yang komprehensif diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga ketertiban selama masa kampanye. Regulasi kampanye adalah kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil dan transparan. Dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas, regulasi mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat, seperti kampanye hitam atau penyebaran informasi palsu. Selain itu, regulasi juga melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Dengan demikian, regulasi kampanye tidak hanya menjaga integritas pemilu, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya iklim politik yang kondusif dan stabilitas negara.

Efektivitas sosialisasi regulasi kampanye dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk pemilihan metode yang tepat, kualitas pesan yang disampaikan, serta partisipasi aktif masyarakat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik secara signifikan terhadap Kampanye tersebut. Sosialisai ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi tersebut dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kampanye dan menciptakan suasana kampanye yang kondusif. Hasil dari sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi yang lebih efektif dalam penyelenggaraan pemilu mendatang

B. Metode Pengabdian

Sasaran atau target dalam kegiatan pengabdian ini adalah dari pihak partai politik,tim pemenangan paslon,instansi daerah baik dari kecamatan,daerah dan kelurahan, bawaslu dan organisasi masyarkat diwilayah Kota Banjarbaru. Kuota tersedia untuk kegiatan ini diberikan sekitar 60 orang dengan undangan dari KPU

terhadap beberapa instansi yang dituju.

Adapun metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah: metodologi Service Learning pendekatan pendidikan yang melibatkan mahasiswa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. dikegiatan ini selaku dari mahasiswa kami memberikan pemaparan informasi terhadap bagaimana regulasi tentang kampanye walikota&wakil walikota tahun 2024 agar sekiranya dari seluruh tamu yang berhadir bisa memahami dan menyebarluaskan dari informasi tersebut kepada ruang lingkup yang lebih luas lagi yaitu Masyarakat Banjarbaru

1.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan sosialisasi regulasi kebijakan kampanye untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 di Hotel Roditha Banjarbaru. Sosialisasi yang berlangsung selama satu hari penuh ini menghadirkan narasumber internal dari jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru serta narasumber eksternal dari berbagai institusi, termasuk Kepolisian Resor Kota Banjarbaru.

1.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Kegiatan sosialisasi regulasi kebijakan kampanye untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini dibagi dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Perencanaan

Sosialisasi regulasi kebijakan kampanye walikota dan wakil walikota merupakan langkah krusial dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat umum, tentang aturan-aturan yang berlaku dalam kampanye.

2. Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi regulasi kebijakan kampanye walikota dan wakil walikota diselenggarakan secara Tatap Muka dengan Narasumber menyampaikan materi terkait Regulasi Kampanye dan berinteraksi dengan seluruh peserta secara *Offline*.

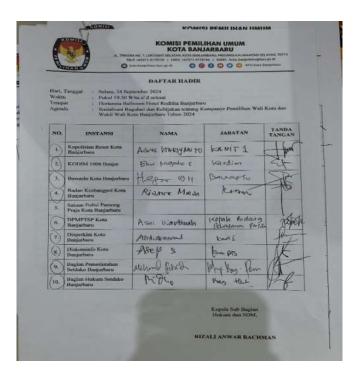
3. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Sosialisasi regulasi kebijakan kampanye walikota dan wakil walikota dilakukan untuk 2 jenis kegiatan, yaitu evaluasi untuk peserta Sosialisasi dan evaluasi untuk kegiatan Sosialisasi. Materi yang telah diberikan saat kegiatan sosialisasi terseut untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Regulasi Kampanye secara Damai.

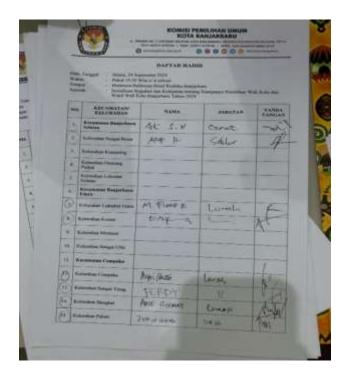
1.3. Pengambilan sempel



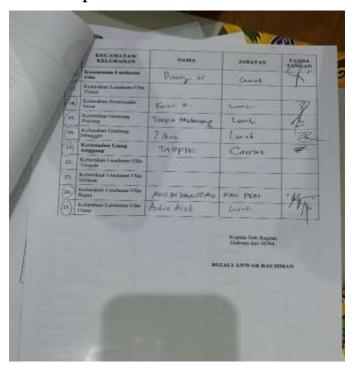
Gambar 1 Daftar hadir Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dan 2



Gambar 2 Daftar hadir Instansi pemerintahan di Kota Banjarbaru



Gambar 3 Daftar hadir Kepala Kecamatan/Kelurahan di Kota Banjarbaru



Gambar 4 Daftar hadir Kepala Kecamatan/Kelurahan di Kota Banjarbaru

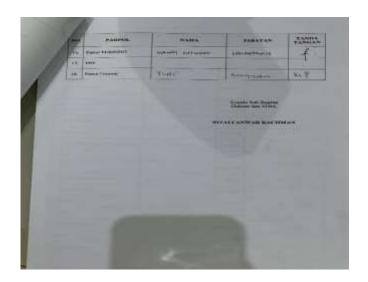
| BAPTAR HADDS | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|--|--|--|--|
| | Indiana 14 Naparesine 2014 Philad 14 30 William I declared Appleaded Malfred Hard Man Section 18 or other Art Acts World World II on Naparesine | the State of | d total day | | | | |
| | **** | SABATAN | TANKA. TANKAN | | | | |
| (a) A22 | MILITARY PARTOR | HAND COMPANIES | -386 | | | | |
| 1) 80 | STERRY POPMENT | ANTOCOTA FOR | description | | | | |
| 3 000 | y8:# | dut treps notice | 1 | | | | |
| Herw | 0263000 | | 9 | | | | |
| 5 54 | 10-21 SHE-FF | L = TARIS = FI | 1 | | | | |
| C 10 | menned wine | L= Freien) | 化压工 | | | | |
| 2) 34 | m. 6 F | Piert-ten. | 10 | | | | |
| 8 W | 14 annua 1 . 14 annua 14 | Whiter | Ste | | | | |
| - | 217 | Blika | H | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Wagnels Said House Historic state 1127 | | | | | |

Gambar 5 Daftar hadir tambahan dari Tim pemenangan pasangan calon dari nomor urut 1 dan 2

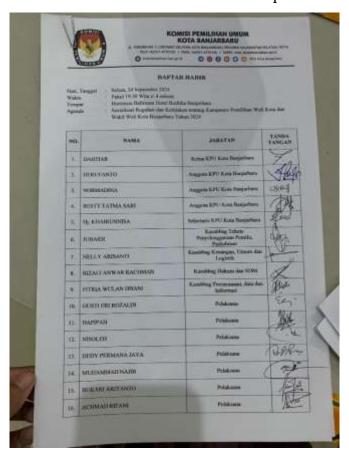
| t me to the total the total | Torqui Apresia | Flated IVI for the Horsessia Halfs Newsphase Rise | marker 1916 The or depletons Innex Herst Brottlike Depterhens solder Clar Kelleystein underg Kan on Mangarlams Valum 2018 | Total Marie Wall | - |
|--|-------------------|---|---|------------------|-------|
| 2. Principle August Value Land | NO. | PARTIE. | 2481 | INNERS | TANDA |
| Form Hat Assess Enlight Statemark P. Form Hat Assess Enlight Statemark Form Hat A | 1 100 | | Day 1 | With | 2 |
| 4. Parts Collect 5. Parts Smaller 6. Parts Smaller 7. Parts Smaller 7. Parts Smaller 8. Parts Smaller 9. Parts Sma | 2 100 | GORDHOMA. | Aus & Em | 1-0 | h |
| Description Desc | 1. 100 | Newpo | | | |
| Permit Hands Permit Handson Statem Qui Milestrated (SCHESTONE) q Permit Committees Statement (Qui Milestrated (SCHESTONE) q Permit Handson Statement (SCHESTONE) q Permit Handson Statement (SCHESTONE) q Permit Handson Statement (SCHESTONE) q | 4. (10) | e Goldon | ARWAH | TENTON - | 1 |
| Point Consisting Holyse Qu'i athergonic (Chippenell) q Holyseller FEX | S. Pers | - Transition | | | |
| E PES. I PESE SE PRODUCTION SERVICE SE SERVICE SE SERVICE SE | s. Per | 11 | | | 0 |
| 16. From that August Balton St. arranger Ph. Switzerschafe | s Pare | Considered States | des mynamic | SCHRESHIES . | 1 |
| II. From the Assest Ralger St. of Pt. Stein Marchia | E 250 | | | | |
| | 0. HEN | | | | |
| II. Penn Unich | 32 Per | The Annual Bulgar | minut the | Promocio | |
| | II. Pate | Carella | | | |
| IE BAN Harristo Superi | II PAN | | Harinsto | Sugar | 12 |
| 12 PAN Harmon's Boyen . | 11. POSE | | Teman - | Kathe | 13 |
| 14. Parti Dombres N. ALAL CHECKY. Petr John | 14. Parti | Demokrat | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. | Mes some | 13 |

http://shariajournal.com/ir

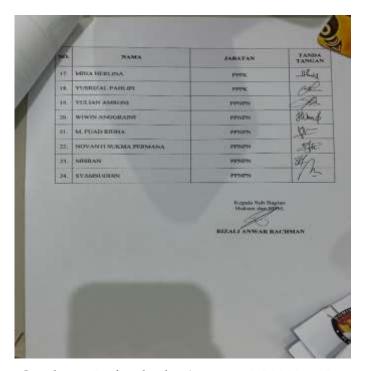
Gambar 6 Daftar hadir Partai Politik



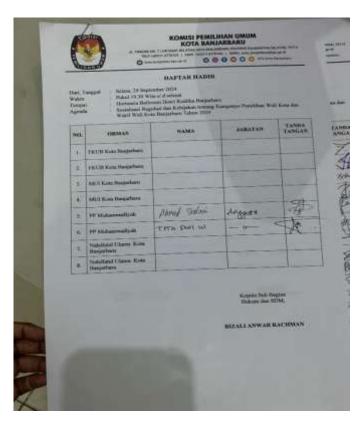
Gambar 7 Daftar hadir Partai poitik



Gambar 8 Daftar hadir Anggota KPU Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Gambar 9 Daftar hadir Anggota KPU Kota Banjarbaru



Gambar 9 Daftar hadir Anggota KPU Kota Banjarbaru



Gambar 10 Daftar hadir Organisasi Masyarakat di Kota Banjarbaru

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru 2024, Pemerintah Kota Banjarbaru telah melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai regulasi dan kebijakan kampanye.

Metode kampanye yang beragam dan landasan hukum yang jelas menjadi kunci dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Banjarbaru. Dengan pendekatan yang transparan dan sesuai dengan regulasi, diharapkan proses pemilihan dapat berjalan dengan baik, adil, dan demokratis. Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dan memastikan semua pihak mengikuti aturan yang berlaku demi suksesnya Pilkada ini.

Salah satu fokus utama dalam sosialisasi ini adalah Kegiatan sosialisasi juga membahas **pengaturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)**. Pemasangan APK harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu, termasuk memperhatikan lokasi pemasangan agar tidak mengganggu ketertiban umum. KPU Banjarbaru telah menetapkan lokasi-lokasi tertentu di mana pemasangan APK

dilarang dan di perbolehkan.

Dalam sosisalisasi yang di adakan oleh KPU tersebut KPU juga menyampaikan dan menekankan bahwa mengikuti regulasi yang telah di sahkan agar sekiranya kampanye pilkada di banjarbaru yang dilaksanakan dapat berjalan dengan aman, baik, adil dan tentram.

KPU banjarbaru juga menyampaikan dalam sosialisasi itu perihal dengan hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar aturan dengan tegas dan hukuman itu juga sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan .

Metode kampanye yang beragam dan landasan hukum yang jelas menjadi kunci dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Banjarbaru. Dengan pendekatan yang transparan dan sesuai dengan regulasi, diharapkan proses pemilihan dapat berjalan dengan baik, adil, dan demokratis. Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dan memastikan semua pihak mengikuti aturan yang berlaku demi suksesnya Pilkada ini.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi regulasi dan kebijakan kampanye di Kota Banjarbaru 2024 menunjukkan langkah positif dalam menciptakan pemahaman yang sama di antara semua pihak terkait. Meskipun terdapat beberapa perubahan dalam regulasi, penekanan pada netralitas ASN dan pengawasan oleh Bawaslu menjadi aspek penting untuk memastikan Pilkada berlangsung secara adil dan transparan. Keberhasilan sosialisasi ini akan sangat bergantung pada implementasinya di lapangan serta komitmen semua pihak untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

3.1 Perencanaan

Kegiatan sosialiasi dilakukan pada tanggal 22 September 2024 secara offline dengan menghadirkan narasumber internal dari jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru serta narasumber eksternal dari berbagai institusi, termasuk Kepolisian Resor Kota Banjarbaru.

Dahtiar ,SH, MH. selaku Kepala Pimpinan KPU Kota Banjarbaru. Kegiatan sosialisasi ini mengambil tema "Sosialisasi regulasi kebijakan kampanye walikota dan wakil walikota.

Selanjutnya, pendaftaran untuk kegiatan Sosialisasi dan Regulasi Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 dibuka dengan kuota sebanyak 60 orang. Peserta melakukan registrasi secara offline yang sudah disediakan oleh pihak panitia panitia Sosialisai tersebut.

Untuk sosialisasi Regulasi Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024, kegiatan dilakukan secara offline atau dengan tatap muka dengan datang ke Hotel Roditha sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan tidak dilakukan sosialisasi tersendiri karena sudah banyak masyarakat yang mengenal tentang Regulasi Kampanye.

Perencaaan kegiatan Regulasi Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 melibatkan beberapa instansi pemerintah, Partai Politik, Tim Pemenang Paslon, Kelurahan dan Berbagai Organisasi Masyarakat. Kalimantan Selatan. Acara ini diadakan untuk memberikan masukandan arahan terhadap pelaksanaan Kampanye wali kota dan wakil wali kota.

3.2 Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi dan penyeluhuan dari regulasi kebijakan kampanye walikota&wakil walikota Banjarbaru dimulai dari jam 20.00 WITA sampai selesai peserta yang dihadirkan dalam acara berkisar dari 60-70 orang materi pertama disampaikan oleh komisioner KPU divisi hukum dan pengawasan serta divisi sosialisasi, pendidikan, pemilih,partisipasi masyarakat dan SDM ibu Resty Fatma Sari, SH, MH. Dengan pemaparan materi dari regulasi kampanye sesuai aturan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 materi disampakan dengan kurun waktu 2 jam dengan metode presentasi interaktif terhadap para peserta

selanjutnya materi selanjutnya disampaikan oleh bapak dari kapolres Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah, S.I.K., S.H., M.SI dengan materi

tentang pemberitahuan dari pelaksanaan kampanye dalam masa yang telah ditentukan beliau menekankan agar dalam melaksanakan kampanye para pasangan calon mematuhi dari aturan yang telah ditetapkan dan memberitahukan jikalau ingin melaksanakan kampanye harus ada pemberitahuan supaya tidak ada kegiatan melawan hukum yang dilakukan.



Gambar 11: pembukaan sosialisasi regulasi dan kebijakan tentang kampanye walikota&wakil walikota



Gambar 12: Sesi pemaparan materi

Klasifikasi pemaparan materi dibagikan dibawah:

(Sesi 1 : regulasi kampanye sesuai aturan PKPU Nomor 13 Tahun 2024)

(Sesi 2 : pemberitahuan dari pelaksanaan kampanye dalam masa yang telah ditentukan)

Selesai kegiatannya tepat pada pukul 11.57 WITA malam dengan dari target dari KPU yang dikatakan cukup memenuhi dari pemahaman para peserta yaitu paham mengenai tentang regulasi dan kebijakan selama masa kampanye walikota&wakil walikota tahun 2024.



Gambar 13 : Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa Hukum Tata Negara pada Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Tentang Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang di adakan Oleh KPU Banjarbaru.

D. Simpulan dan Saran

Kegiatan sosialisasi Kampanye dan Regulasi Kebijakan Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara offline oleh KPU Kota Banjarbaru telah terlaksana dengan lancar. Secara keseluruhan berdasarkan evaluasi kegiatan, pencapaian kegiatan Sosialisasi telah terlaksana 90%, di mana terlihat dari tingkat Kelancaran dan Kedisiplinan peserta yang Hadir. Para Peserta telah dibekali dengan berbagai pengetahuan berupa Kebijakan dan Regulasi Kebijakan Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru dan arahan untuk melaksanakan Kampanye secara Damai.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas sosialisasi regulasi dan kebijakan kampanye Pemilu 2024 dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik. sosialisasi ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dalam sosialisasi, serta sejauh mana informasi tersebut mempengaruhi niat mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu secara damai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum cukup informatif dan menarik. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi di masa mendatang, disarankan untuk melibatkan lebih banyak influencer media sosial dalam menyebarkan informasi, serta mengembangkan materi sosialisasi yang lebih kreatif dan interaktif.

Daftar Pustaka

https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/532

https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024

https://www.liputan6.com/hot/read/5658543/dasar-hukum-pilkada-2024-ini-alasan-kenapa-dilaksanakan-serentak

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/578447/kampanye-adalah-metodetujuan-dan-cara-melakukan

Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI Diterbitkan Oleh: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Jl. Loader No. 7 Baranangsiang Bogor 16143